



Jurus Tandır

Laporan Perkumpulan Huma 2018

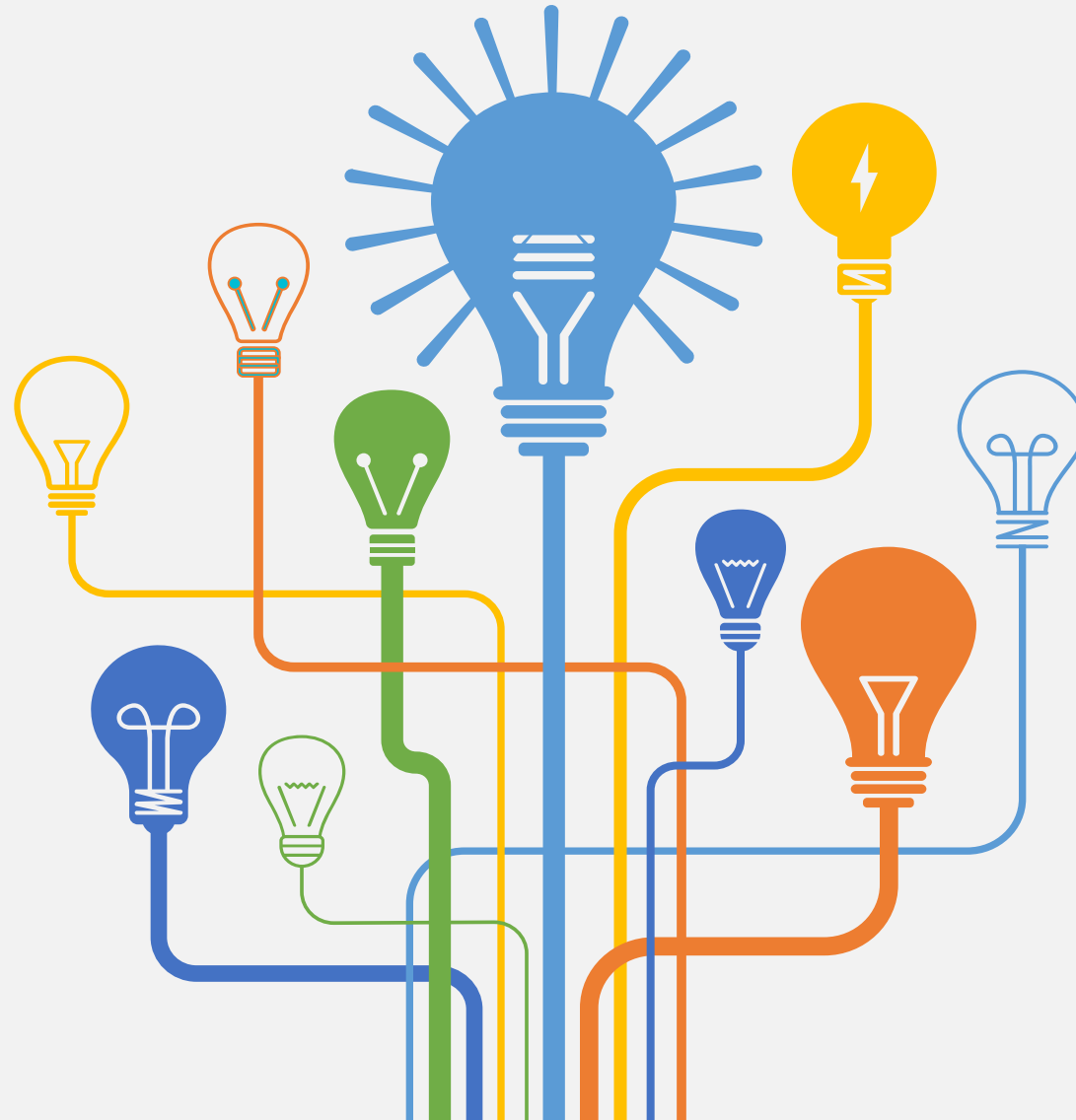


Latar Belakang

Tahun 2018 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya karena keseharian kita terbelah menjadi kubu cebong dan kubu kampret menjelang pilpres 2019, namun ada pula perkara pilkada serentak yang terbagi ke dalam seratus lima puluh empat (154) kabupaten atau Pilkada Kabupaten, dan dua belas (dua belas) Pilkada Provinsi. Dari kontestasi politik itu kemudian calon kepala daerah berangsur-angsur konsisten mendorong hutan adat dan/atau menerbitkan produk hukum daerah yang terkait Masyarakat Hukum Adat. Pada saat bersamaan, implementasi *nawacita* yakni membangun dari pinggiran, khususnya hutan adat yang Huma kerap dampingi, masih tidak menunjukkan angka signifikan. Skema masih berbelit pada adanya prasyarat normatif tentang pengakuan masyarakat hukum adat, yakni melalui produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah).

Dalam perjalanan advokasi itu kami teringat lagu Slank "*Jurus Tandu*", kepanjangan dari Jurus Pantang Mundur. Jurus tandur layak kita sematkan bagi mereka yang kerap berjuang untuk Indonesia menjadi lebih baik. Untuk itu penting sebagai akuntabilitas dan pembelajaran, kami Perkumpulan Huma yang bergerak dalam isu pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis melaporkan kerja-kerjanya di tahun 2018. Laporan ini dibuat agak berbeda dengan lebih banyak grafis yang ringkas dan padat.

Laporan Huma 2018



Metode

Metode yang dibuat dalam laporan ini adalah melalui konten infografik agar lebih memudahkan pembaca menerima informasi. Laporan ini tidak bertujuan untuk menyederhanakan kerja-kerja Huma dan isi materi maupun sumber data tapi bersifat pemadatan. Kompleksitas tetap tersaji dalam laporan ini dalam sebuah visualisasi yang menarik, atau dalam bahasa kerennya *eye catching*.

Disclaimer

Laporan ini merupakan ringkasan dari beberapa laporan Huma ke para lembaga donor, untuk itu bila ingin mengetahui laporan secara lebih detail dan rinci dapat menghubungi kantor Huma.

SELAMAT MEMBACA

Rakornas Hutan Adat dan Tim Percepatan

Terlaksananya Rakornas dan adanya target di lima regional. Ada hutan adat baru yang ditetapkan di 16 komunitas. Serta dibentuk tim percepatan hutan adat di akhir tahun 2018.

Global-Lokal Advokasi

Penyusunan Produk Hukum Daerah di Paser Kaltim, Riau, Bintuni Papua. Pengajuan 5 hutan adat di PSKL. Advokasi hutan adat di COP 24 Polandia.



4 Sekolah Lapang terkait Hutan Adat

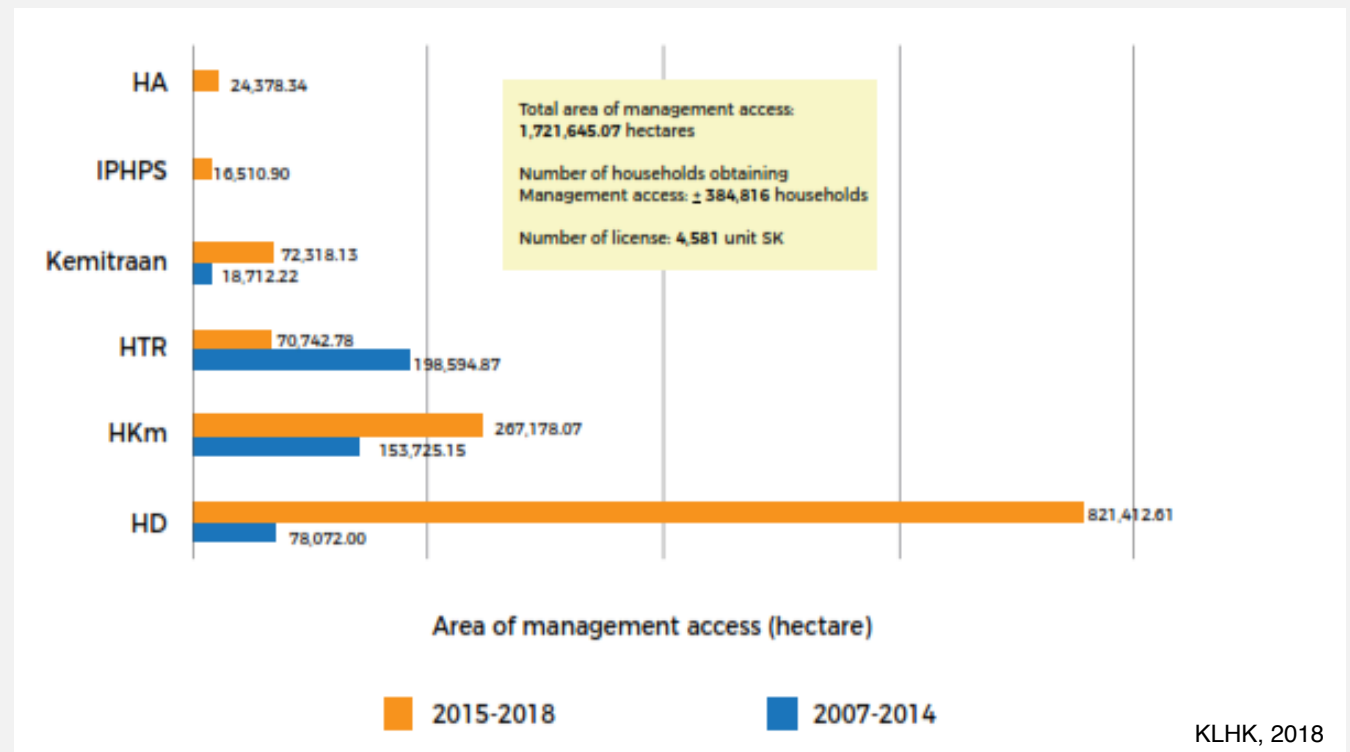
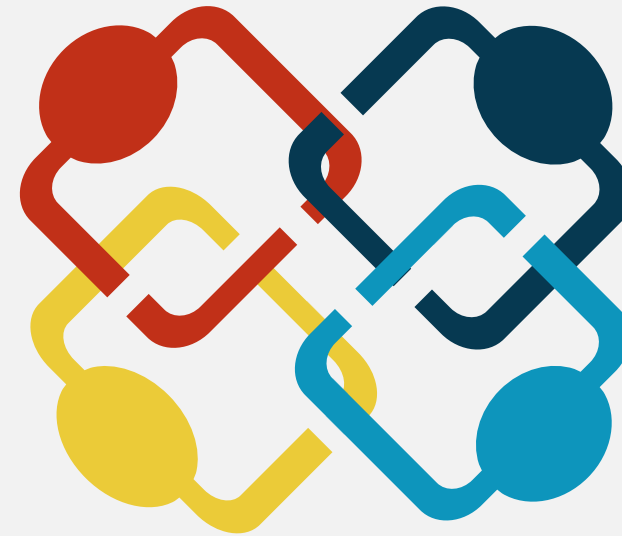
Bekerjasama dengan INSIST melakukan sekolah lapang untuk pengorganisasian masyarakat di Mamuju Sulbar, Melawi Kalbar, Lebak Banten, Tanah Datar Sumbar.

Legal Frameworks

Riset tentang Legal Framework Hutan Adat, Opini Hukum Papua, Laporan Outlook Humawin 2018.

Hutan Adat

Dalam mewujudkan adanya perluasan pengakuan hutan adat serta melakukan pembaruan kebijakan sumber daya alam di tingkat nasional, HuMa mendorong terlaksananya Rapat Koordinasi “Nasional Hutan Adat antar Kementerian dan Lembaga” pada 23-24 Januari 2018 serta lobi di KLHK sampai awal Agustus 2018 ini. Diskusi-diskusi ini telah mendorong lima panel percepatan. Lima panel itu adalah regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara, regional Sulawesi, regional Sumatera, regional Kalimantan, dan regional Maluku-Papua. Diskusi panel ini bertujuan untuk membahas permasalahan di lapangan dan merumuskan solusinya agar percepatan hutan adat dilakukan. Selain itu, telah dibentuk tim percepatan hutan adat, Huma ikut di dalamnya. Beberapa diskusi telah dilakukan. Diskusi ini juga mendata potensi calon hutan adat di masing-masing regional. Berdasarkan hasil diskusi tim percepatan itu, beberapa kesimpulan permasalahan dan solusinya telah didapatkan. Meski hasil capaian hutan adat masih menunjukkan hasil jauh dari target.





MK 35

.....

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi UU 41/1999 tentang Kehutanan melalui putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

2013




PERMEN 32

.....

Dengan dasar P.32/Menlhk Setjen/2015 ini, pendaftaran hutan adat pertama kali diajukan pada 5 Oktober 2015.

2015



HUTAN ADAT

.....

30 Desember 2016, Jokowi menyerahkan Hutan Adat bagi 9 (Sembilan) masyarakat hukum adat dengan luas 7.949,99 hektar.

2016



PIDATO NEGARA

.....

Pada 16 Agustus 2017, di hadapan sidang paripurna MPR RI Pidato Presiden berkomitmen meneruskan hutan adat.

2017

KRONIK HUTAN ADAT

RAKORNAS

Menghasilkan kesepakatan data spasial dan sosial di lima region di Indonesia. Total klaim 152 klaim 2,25 juta hektar.

28/JAN

SEKOLAH

Bersama INSIST melakukan Sekolah Lapang agar masyarakat memiliki perencanaan ketika sudah mendapat hutan adat.

19/MEI

REMBUKNAS

Rembuk Nasional 2018, SK Hutan Adat kembali diserahkan dengan total area 5.952 hektar untuk 16 Komunitas.

20/SEP

TIM

Adanya Tim Nasional untuk Percepatan Penetapan Hutan Adat terdiri dari anggota Huma, KLHK, akademisi dan peneliti.

25/OKT

KRONIK HUTAN ADAT 2018

HUTAN ADAT



Target

12,7 juta hektar kawasan hutan untuk berbagai skema perhutanan sosial, termasuk hutan adat.



Hutan adat dari APL

10.919,62 hektar berasal dari area di luar kawasan hutan, atau disebut Areal Penggunaan Lain (APL).



Konservasi

4,474 hektar dari fungsi konservasi



Capaian

perhutanan sosial baru mencapai 2,13 juta hektar, atau 16,8% dari target.



Hutan adat dari Kawasan Hutan

6.323,99 hektar berasal dari kawasan hutan



Lindung

64 hektar dari fungsi lindung



Hutan Adat

33 (tiga puluh tiga) hutan adat yang sudah ditetapkan dengan luas 17.243,61 hektar



Produksi

1,786 hektar dari fungsi produksi

ADVOKASI KEBIJAKAN

Regulasi

Membantu mendorong Pergub Riau, Perbup Paser Kaltim, Perda Mentawai, Perda Teluk Bintuni.

Kekhususan

Advokasi wilayah dengan otonomi khusus **Hutan Adat** di Aceh dan Papua.

Multipihak

Menjadi anggota **tim percepatan hutan adat**. Di sektor lain kita juga Menciptakan *Integrated Business Licensing Services*.

Masyarakat

Ada **68 Community Organizers** yang telah terlatih melakukan pengorganisasian di masyarakat untuk perencanaan perhutanan sosial.



Dalam advokasi kebijakan, di tahun 2018 Perkumpulan Huma menghasilkan berbagai kajian hukum mengenai aspek hak dalam skema program negara, misalnya perhutanan sosial. Huma juga melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional hingga internasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat. Aktivitas-aktivitas utama advokasi huma adalah berbasis hak. Beberapa penyusunan peraturan daerah dan lokal harus mencerminkan kearifan tradisional dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, dan melakukan kajian melalui metode hukum kritis.



Legal Drafting

ADVOKASI
PERATURAN

RUU Masyarakat Adat

Pembuatan DIM bersama AMAN

RUU Kehutanan

Pembuatan kertas posisi bersama guru besar IPB

JR Perpres 88/2017

Opini Hukum Perpres 88/2017 bekerja sama dengan Epistema dan AMAN

JR PP No. 24/2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik




Penyusunan Draft
Pergub Tanah Ulayat
Riau


LEGAL DRAFTING



Penyusunan Perbup
MHA Kabupaten Paser
Kalimantan Timur



Penyusunan Draft
Perda Provinsi
Masyarakat Hukum
Adat Papua Barat



Penyusunan Draft
Perda MHA di Teluk
Bintuni Papua Barat

HASIL RISET HUMA

01

LEGAL FRAMEWORK

Kerangka Hukum Hutan Adat di Indonesia.

02

OPINI PAPUA

Opini Hukum mengenai penguasaan sumber daya alam di Papua dengan UU Otsus, termasuk hutan adat.

03

KONSERVASI

Assesment dampak penetapan hutan adat di kawasan konservasi

04

RISET GAMBUT

Riset skema hukum pengelolaan gambut

326 Konflik SDA dan Agraria



Huma

mengembangkan *tools* pendokumentasian konflik yang biasa disebut dengan HuMaWin (<https://humawin.huma.or.id>). *Tools* ini membantu mempermudah dalam mengidentifikasi para pelaku konflik, klaim para pihak, kronologi, sejarah konflik, narasi peristiwa sepanjang konflik berlangsung. Ada pula jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pelaku konflik. Kategorisasi dalam HuMaWin dibuat dengan memodifikasi sistem pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia Huridocs dengan mengintegrasikan data klaim terkait dengan konflik.

Permasalahan Penghambat Advokasi





Sekolah Lapang

Di tahun 2018 Huma mengembangkan sekolah lapang berbasis regional di empat lokasi. Sekolah yang diinisiasi bersama INSIST ini diharapkan menghasilkan strategi pengembangan yang sistematis sehingga jumlah organisator di masyarakat semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, pemberdayaan, *legal drafting*, *conflict resolution*, dan advokasi kebijakan.



HuMa mencoba berinovasi pada 2018 untuk mengembangkan sekolah pengorganisasian masyarakat dan advokasi kebijakan dengan model lanskap. Model lanskap yang dimaksud adalah dengan menempatkan dan menyelenggarakan kegiatan sekolah pengorganisasian masyarakat dan advokasi kebijakan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi hutan adat secara langsung.



HuMa mencoba meyakinkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menginisiasi untuk menghimpun masukan, saran serta ide dan gagasan dalam perencanaan penyelenggaraan Sekolah Lapang untuk Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Kebijakan dari berbagai perspektif.



PHR

Di tingkat komunitas Huma bekerja bersama para PHR yaitu para Pendamping Hukum Rakyat (sepaimana didefinisikan dalam Lokakarya Lembang, 12 – 14 Desember 2007) adalah “*orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaharuan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekologis*”

MAMUJU SULBAR

Sekolah Lapang di Sulawesi Barat dilakukan pada September–November 2018. Peserta sekolah lapang ini diikuti oleh perwakilan dari masyarakat dan perangkat desa dari 4 (empat) wilayah yaitu Desa Taan, Desa Rantedoda, Desa Kopeang dan Desa Bela mengenai pentingnya tata ruang dan pertanian organik.

PASIR EURIH

Dilaksanakan Oktober–Desember 2018 di Pasir Eurih Lebak, Banten. Ada persoalan hukum terkait dengan pengajuan hutan adat yang telah dilakukan oleh MHA Kasepuhan Pasir Eurih.



MELAWI KALBAR

Dilaksanakan pada 4–12 Oktober 2018 di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi merupakan wilayah dampingan dari Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) sejak tahun 2007, pasca adanya kriminalisasi masyarakat karena dituduh merambah kawasan hutan konservasi dalam lingkup Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.

MALALO TIGO JURAI

Sekolah Lapang Regio Sumatera Barat yang diselenggarakan pada Oktober–November 2018 berangkat dari kebutuhan utama terkait dengan sinkronisasi pola pengorganisasian dengan advokasi kebijakan hutan adat yang saat ini sedang dijalani oleh Masyarakat Malalo Tigo Jurai.

MAMUJU

Pemetaan dan Pertanian Organik.

SULBAR

Melihat situasi dan kondisi geografis yang mendukung dari 4 (empat) desa yang ada. Masing-masing desa memiliki beberapa lahan tidur yang jarang sekali dimanfaatkan oleh warga sekitar karena ketidakmampuan dan minimnya pengetahuan atau informasi terkait pengembangan varietas tanaman dan pengelolaan tanah.

01

GUGUK MALALO

Metode jembatan penghubung digunakan dalam menginternalisasi pemahaman pemuda terkait dengan perjuangan Malalo Tigo Jurai dengan membentuk kader dan gerakan pemuda/i yang saling mendukung dengan tokoh-tokoh adat Malalo saat ini.

02

SUMBAR

Pengorganisasian Pemuda dan Perencanaan Daerah Ekowisata

MELAWI

Pengelolaan lahan dan pengembangan varietas tanaman

KALBAR

Kecamatan Menukung dan Kecamatan Sokan merupakan wilayah dengan potensi alam yang sangat kaya, sayangnnya pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat belum merata, sehingga belum terdeteksi betul potensi wilayah adat serta kandungan sumber daya yang ada di dalamnya.

03

PASIR EURIH

Proses pembuatan pangkalan data sebagai basis menjadi salah satu bagian dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kasepuhan (yang didalamnya juga termasuk masyarakat Desa Sindanglaya).

04

LEBAK

Transek dan Pembuatan Pangkalan Data Sosial Ekonomi

MATERI
SEKOLAH LAPANG

Peraturan Desa Gambut

Ada 15 (lima belas) draf Peraturan Desa terkait dengan Pengelolaan Kawasan Gambut

Bantuan Bencana Alam

Membantu dalam *procurement* dan *assessment* bencana alam di Palu, Sigi dan Donggala paska bencana tsunami, gempa bumi dan liquifaksi

Presentasi di COP 24 Polandia

Huma menjadi pemateri dalam Indonesia Pavilion di COP 24 Katowice, Polandia mengenai *legal frameworks* Hutan Adat

Fasilitator Gambut

Huma bekerjasama dengan BRG telah melakukan pendidikan kepada 105 (seratus lima) orang fasilitator desa gambut untuk melakukan program restorasi wilayah gambut

Pembuatan Apps Huma

Pembuatan aplikasi huma dalam bentuk apps di *Google Playstore* untuk memudahkan publik mengetahui kerja-kerja Huma

Simposium Nasional

Huma telah melakukan Simposium Nasional 20 tahun reformasi di bidang hukum terkait sumber daya alam yang menghadirkan kalangan akademisi se-Indonesia

CAPAIAN
PENTING
LAINNYA



Kerja Sama Lainnya



CAMBRIDGE UNIVERSITY

Penelitian bersama Cambridge University terkait *"Fair Community Benefits and Equitable Land Governance: A Policy Study on Large Scale Land Acquisitions"*



PROTECTION INTERNATIONAL

Bekerja sama bersama PI untuk melakukan pelatihan penguatan isu kerangka pengamanan komunitas di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Sulawesi Selatan.



UNIVERSITAS INDONESIA

Sebagai bagian dari penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi mengenai kebijakan hutan adat, HuMa menginisiasi kegiatan dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia berupa Kuliah Umum Hutan Adat, yang diselenggarakan pada 1 November 2018.



KITLV-LEIDEN UNIVERSITY

Bekerjasama dengan KITLV terkait dengan penelitian jangka panjang (*multi-years*) dengan tema *"Resilience on Palm Oil Conflicts in Indonesia"*



KELEMBAGAAN

Pengembangan Kelembagaan Huma di 2018 berfokus pada perbaikan sistem managerial dan keuangan Huma. Telah dilakukan Rapat Umum Anggota dan restrukturisasi staf tahun ini, demi mendorong Huma yang semakin profesional, kompeten, mandiri dan berpengaruh dalam mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum di Indonesia.

PELATIHAN KEUANGAN

Telah dilakukan pelatihan keuangan pada 27—30 Agustus 2018 kepada para mitra dan jaringan Huma untuk memperkuat sistem keuangan secara komputerisasi agar tercipta akuntabilitas bagi lembaga masing-masing.



PEMBARUAN SOP

Sudah diterbitkan tiga SOP baru di Huma, yaitu SOP Keuangan, SOP Administrasi, dan SOP Personalia.

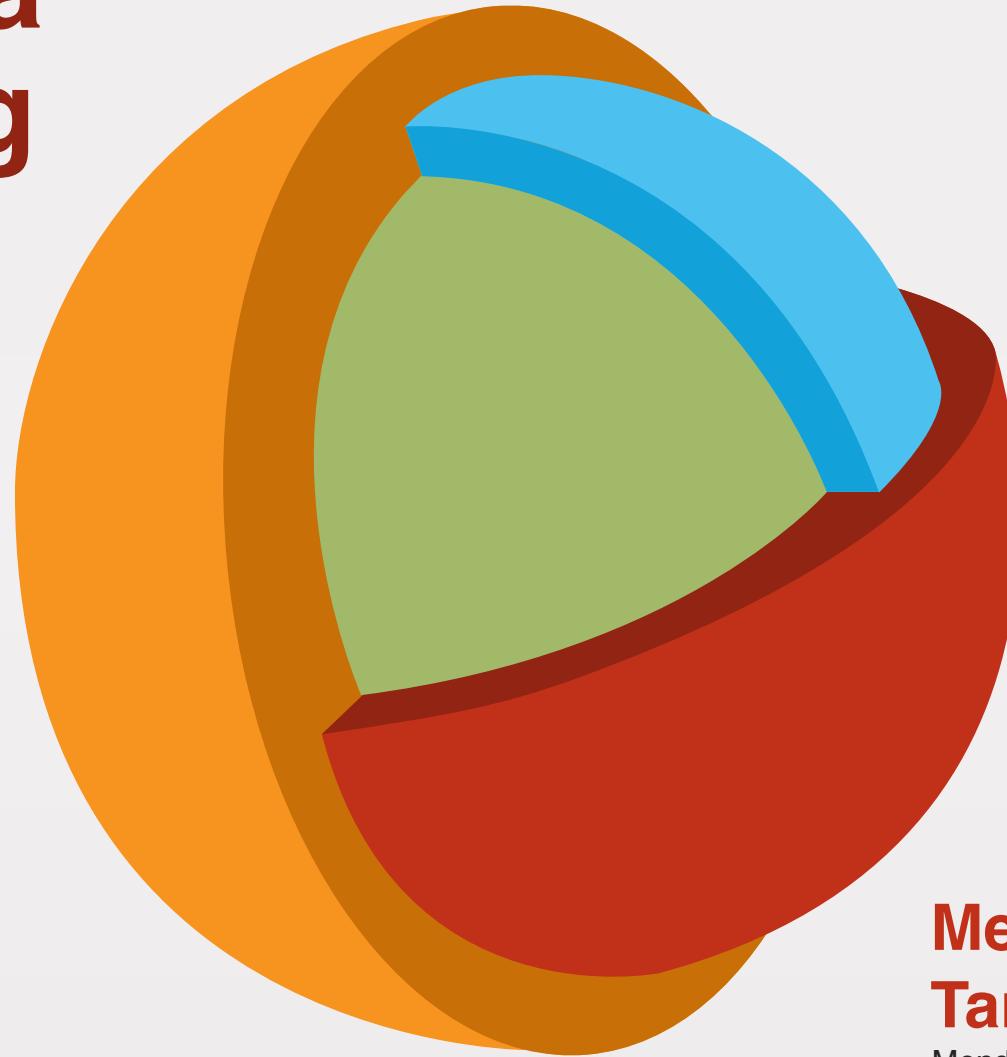
BUKU PROFIL ANGGOTA

Telah diterbitkan buku profil anggota Huma pada Desember 2018. Berisi mengenai biografi singkat para anggota Huma.

Kerja-Kerja Mendatang

Harmonisasi Hukum

Harmonisasi sendiri dilakukan dengan cara: (1) memastikan kewenangan daerah dalam menetapkan masyarakat hukum adat; (2) merumuskan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam bentuk peraturan bersama Menteri-Menteri untuk menjembatani kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki peraturan terkait masyarakat hukum adat; (3) menyelesaikan tata batas kawasan hutan; (4) memasukkan hutan adat dalam peta kawasan hutan; (5) pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak menguasai negara; (6) pendaftaran hak atas tanah di hutan adat; serta (7) pencadangan hutan adat.



Integrasi

Integrasi merujuk Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa UU khusus masyarakat hukum adat merupakan mandat konstitusi. Peraturan sektoral yang tumpang tindih harus dinyatakan tidak berlaku dalam UU baru. Untuk itu diperlukan UU khusus mengenai masyarakat hukum adat. Tidak hanya untuk mengatasi sektoralisme, UU baru ini harus menata ulang hubungan masyarakat hukum adat dengan negara. Selain itu, UU baru ini dapat mengatasi masalah “pengakuan bersyarat” yang selama ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pembela HAM

Penguatan di komunitas akan tetap dilanjutkan melalui sekolah lapang. Tapi juga perlu penguatan dan pemahaman bahwa masyarakat hukum adat dan komunitas lokal merupakan pembela HAM yang perlu dilindungi kerja-kerjanya secara hukum.

Mendefinisi Hak atas Tanah

Mendefinisikan ulang hak atas tanah melalui ATR/BPN agar hutan adat dapat pula didaftarkan sebagai hak atas tanah.

Sebaran Mitra Huma



Lembaga Donor **HuMa** 2018



Ford Foundation (FF)



ICCO Cooperation



The Asia Foundation (TAF)



Rights Resources Initiative (RRI)



Protection International (PI)



Dahniar Andriani
081341333080

Perkumpulan HuMa Indonesia adalah organisasi non-pemerintah bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam. Konsep pembaharuan hukum SDA menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan lokal, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan memelihara kelestarian ekologis.

Selengkapnya lihat:

<https://huma.or.id/home/tentang-huma>

HuMa

Perkumpulan
Huma Indonesia



Website
www.huma.or.id



Telepon
021-78845871



Alamat
Jalan Jatisari II No. 27,
Jatipadang, Jakarta Selatan.

